



DAFTAR BACAAN

Djioen, D, **Tata Laksana Pengurusan Hak Atas Tanah**, Desember 1985.

Gautama, Sudargo, **Tafsiran Undang Undang Pokok Agraria**, Penerbit Alumni/1986/Bandung.

Haryanto, T., **Cara Mendapatkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, Usaha Nasional Surabaya - Indonesia**, 1981.

Isjwara, F, **Pengantar Ilmu Politik**, Putra A Bardin, Bandung, 1966.

Lilieik, Istiqomah, **Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional**, Penerbit Usaha Nasional - Surabaya - Indonesia.

Perangin, Effendi, **Praktek Jual Beli Tanah**, CV. Rajawali, Jakarta Cet. II, Jakarta, Oktober 1990.

Soeprapto, R., **Undang-Undang Pokok Agraria dalam praktek**, 17 Maret 1987.

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria**.

Republik Indonesia, **Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian**.

Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah**.

Republik Indonesia, **Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas Tanah**.

Republik Indonesia, **Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 280)**.

Republik Indonesia, **Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah**.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/Tahun 1970 tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja KANWIL BPN Di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Di Propinsi Dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi Dan Urusan Serta Sub Seksi Pada Kantor Pertanahan Di Kabupaten/Kotamadya.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/- Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Makalah :

Hajati, Sri, **Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Investasi**, Disertasi, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.